



RENJA PERUBAHAN 2025

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2025 telah selesai disusun. Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2025, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan

Pelaksanaan perencanaan dan pembangunan tersebut diatas dapat diwujudkan melalui program dan kegiatan. Untuk mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan pada Tahun 2025 perlu disusun perubahan rencana kerja (Perubahan Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Kerja yang disusun ini merupakan acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan bidang Penanaman Modal Tahun 2025.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Perangkat Daerah guna mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pelayanan perizinan diharapkan dapat menjadi panduan dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional sebagai Dinas teknis. Perubahan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Tahun 2025

Kami menyadari bahwa materi yang disajikan dalam perubahan rencana kerja ini masih banyak kekurangan, dan mengingat dimasa-masa mendatang perubahan-perubahan terus akan terjadi, maka rencana kerja ini masih diperlukan perbaikan-perbaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dan seiring ucapan syukur ke hadirat Allah SWT, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu perangkat daerah di bidang perizinan, telah menyusun program-program dengan kebijakan-kebijakan yang sesuai RPJMD, yakni Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya untuk kesempurnaan, saran dan masukan sangat diperlukan dalam sempurnanya dokumen ini dan semoga bermanfaat. Aamiin.

Tulungagung, 08 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG



FAJAR WIDARIYANTO, SP. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680715 199803 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL 1

BAB I PENDAHULUAN..... 2

1.1 LATAR BELAKANG 2

1.2 LANDASAN HUKUM 3

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 8

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 11

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN

2025 10

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 16

BAB IV PENUTUP 21

4.1 Kaidah – kaidah Pelaksanaan 21

4.2 Rencana Tindak Lanjut 22

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian
Renstra s.d Triwulan I Tahun 2025 8

Tabel 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Tulungagung 11

LAMPIRAN

Perubahan Renja 2025 (Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung berkewajiban menyusun perencanaan kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun serta berfungsi sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang sifatnya lebih operasional.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan berpedoman pada :

- a. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025, dimana Perangkat Daerah harus melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025; dan
- b. Hasil verifikasi Perubahan Renja Tahun 2025. Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri atas:
 - Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
 - Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
 - Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
 - Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
 - Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 mengakomodir adanya dinamika dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama Tahun 2025 sehingga diperlukan perubahan rencana kegiatan Tahun 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan BromoTengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 21. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021;

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 Seri E);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri C);
39. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 30);
40. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.
41. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program/kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 dan untuk memberikan arah bagi Perangkat Daerah dalam melakukan program dan kegiatan yang mengalami perubahan pada Tahun 2025, sehingga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah:

- a. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- b. Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah;
- c. Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- d. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, berkesinambungan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada Bab-Bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Menurut penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Evaluasi Rencana Kerja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II mengacu pada APBD dan perkiraan capaian tahun berjalan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah. Review hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja Triwulan II Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun bersangkutan dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan dan pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah maupun menunjang terwujudnya Tujuan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksana, rencana tidak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil.

Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung memuat review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2025. Penyusunan rencana program/kegiatan perubahan Tahun 2025 memperhatikan realisasi capaian kinerja Tahun 2025 sampai dengan triwulan I, pencapaian target Perubahan Rencana Strategis Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024-2026 serta realisasi pelaksanaan APBD Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Triwulan I, hasil evaluasi Renja Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan
Pencapaian Renstra Triwulan I TAHUN 2025

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Terget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
2					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	18				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL						
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rata – rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dokumen	10 Dokumen	12 Dokumen	0 Dokumen	0 %
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	7 Dokumen	6 Dokumen	0 Dokumen	0 %
2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	0 %
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25 %
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 orang/bulan	23 orang/bulan	23 orang/bulan	23 orang/bulan	25 %
2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi dan Pelatihan Kepegawaian	30 Orang	30 Orang	30 Orang	0 orang	0 %
2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50 paket	50 paket	42 paket	0 paket	0 %

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Terget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)
2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	4 orang	1 orang	0 orang	0 %
2	18	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	44 orang	44 orang	44 orang	0 orang	0 %
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP	80 %	100 %	80 %	25 %	31,25 %
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100 paket	8 paket	16 paket	0 paket	0 %
2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100 paket	57 paket	44 paket	5 paket	11,3 %
2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	100 paket	9 paket	25 paket	0 paket	0 %
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100 paket	9 paket	7 paket	0 paket	0 %
2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25 %
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25 %
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120 Unit	23 Unit	120 Unit	0 Unit	0 %
2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2 Unit	14 Unit	2 Unit	0 unit	0 %
2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	9 Unit	1 Unit	0 Unit	0 %
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen jasa penunjang yang tersedia	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Terget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25 %
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25 %
2	18	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25 %
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25 %
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %	20 Unit	62 Unit	0 Unit	0 %
2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	4 Unit	0 Unit	0 %
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	19 Unit	19 Unit	0 Unit	0 %
2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	0 Unit	0 %
2	18	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36 Unit	60 Unit	111 Unit	0 Unit	0 %
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi (Miliar)	850 Miliar	1.455 M	850 Miliar	243,982 M	28,7%
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Terget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Peningkatan Jumlah Investor	7 %	7.8 %	7 %	47,8 %	682,8 %
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0 %
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota (Kegiatan)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %
2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha yang Terverifikasi	92 %	100 %	92 %	100 %	100 %
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	600 Pemohon	626 Pemohon Perizinan	600 Pemohon	3.849 Pemohon Perizinan	641,5 %
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50 Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0 %
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	600 Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	30 %

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Terget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025		
									Target	Realisasi s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Peningkatan Jumlah Laporan Data Investor	50 %	100 %	50 %	0 %	0 %
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan	0 %
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	5 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	2 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	0%
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	232 Pelaku Usaha	290 pelaku usaha	120 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0 %
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	20 Kegiatan Usaha	42 Kegiatan Usaha	17 Kegiatan Usaha	8 Kegiatan Usaha	47,05 %
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha yang Terintegrasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinana dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah data perizinan dan non perizinan yang diolah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25 %
2	18	06	2.01	0002	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	25 %

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 yang dituangkan dalam bab ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk Matrik Rencana Program dan Kegiatan.

Uraian Rencana Program dan Kegiatan yang disajikan dalam bab ini adalah bersifat menyeluruh, dari kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang didanai oleh APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah / lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 - 2026, program dan kegiatan dikategorikan ke dalam Program/Kegiatan lokasilitas Perangkat Daerah, berikut disajikan perubahan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Tahun 2025.

Adapun rincian Rencana perubahan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Capaian Kinerja		Lokasi		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Tambah/ Kurang Pagu
								Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Lokasi Sebelum Perubahan	Lokasi Setelah Perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-9)
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan										
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
2					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	18				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL							5.843.004.739	5.361.116.439	(481.888.300)
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rata - rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	Tulungagung	Tulungagung	5.522.280.002	5.166.487.139	(355.792.863)
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	14	14	Tulungagung	Tulungagung	1.664.000	1.248.000	(416.000)
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	6	Tulungagung	Tulungagung	832.000	624.000	(208.000)
2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	12	Tulungagung	Tulungagung	832.000	624.000	(208.000)
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	12	12	Tulungagung	Tulungagung	4.423.310.439	4.033.166.639	(390.143.800)
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	23	23	Tulungagung	Tulungagung	4.349.240.439	3.959.096.639	(390.143.800)
2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	Tulungagung	Tulungagung	74.070.000	74.070.000	0
2	18	01	2.03		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi dan Pelatihan Kepegawaian	Orang	30	30	Tulungagung	Tulungagung	41.488.000	30.458.000	(11.030.000)
2	18	01	2.03	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	paket	50	42	Tulungagung	Tulungagung	17.158.000	17.158.000	0
2	18	01	2.03	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	2	1	Tulungagung	Tulungagung	10.330.000	9.870.000	(460.000)

				0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	44	44	Tulungagung	Tulungagung	14.000.000	3.430.000	(10.570.000)
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang sesuai SOP	%	80	80	Tulungagung	Tulungagung	178.765.500	225.830.400	47.064.900
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket	100	16	Tulungagung	Tulungagung	7.166.000	7.166.000	0
2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	100	44	Tulungagung	Tulungagung	50.000.000	69.672.200	19.672.200
2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	paket	100	25	Tulungagung	Tulungagung	15.000.000	15.000.000	0
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	paket	100	7	Tulungagung	Tulungagung	41.439.300	74.007.000	32.567.700
2	18	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	Tulungagung	Tulungagung	7.512.000	7.512.000	0
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	Tulungagung	Tulungagung	57.648.200	52.473.200	(5.175.000)
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Tersedia	Unit	120	120	Tulungagung	Tulungagung	11.782.500	11.782.500	0
2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	2	2	Tulungagung	Tulungagung	3.120.000	3.120.000	0
2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	1	1	Tulungagung	Tulungagung	8.662.500	8.662.500	0
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang yang Tersedia	Laporan	12	12	Tulungagung	Tulungagung	598.401.600	595.481.600	(1.880.000)
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	Tulungagung	Tulungagung	1.560.000	1.040.000	(520.000)
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	12	Tulungagung	Tulungagung	136.200.000	136.200.000	0
2	18	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	12	12	Tulungagung	Tulungagung	230.400.000	228.000.000	2.400.000
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	12	Tulungagung	Tulungagung	230.241.600	230.241.600	0
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Unit	100	100	Tulungagung	Tulungagung	197.470.000	268.520.000	71.050.000
2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	4	Tulungagung	Tulungagung	113.110.000	139.410.000	26.300.000
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	19	19	Tulungagung	Tulungagung	10.000.000	10.000.000	0

2	18	01	2.08	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	2	Tulungagung	Tulungagung	50.000.000	43.000.000	(7.000.000)
2	18	01	2.08	0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	36	111	Tulungagung	Tulungagung	24.360.000	76.110.000	51.750.000
2	18	02	2.01		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi (Miliar)	Miliar	850	850	Tulungagung	Tulungagung	39.077.500	29.570.500	(9.507.000)
2	18	02	2.01		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	1	Tulungagung	Tulungagung	39.077.500	29.570.500	(9.507.000)
2	18	02	2.01	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	1	Tulungagung	Tulungagung	30.077.500	29.570.500	(9.507.000)
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Peningkatan Jumlah Investor	%	7 %	7 %	Tulungagung	Tulungagung	46.922.200	13.654.800	(33.267.400)
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	Kegiatan	2	2	Tulungagung	Tulungagung	46.922.200	13.654.800	(33.267.400)
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota (Kegiatan)	Dokumen	1	1	Tulungagung	Tulungagung	46.922.200	13.654.800	(33.267.400)
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha yang Terverifikasi	Prosentase	92 %	92 %	Tulungagung	Tulungagung	111.327.500	52.114.000	(59.213.500)
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemohon Perizinan	600	600	Tulungagung	Tulungagung	111.327.500	52.114.000	(59.213.500)
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	50	150	Tulungagung	Tulungagung	83.317.500	30.100.000	(53.217.500)
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	600	20	Tulungagung	Tulungagung	28.010.000	22.014.000	(5.996.000)

2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Peningkatan Jumlah Laporan Data Investor	Prosentase	50 %	50 %	Tulungagung	Tulungagung	98.411.500	22.276.500	(76.135.000)
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan	12	120	Tulungagung	Tulungagung	98.411.500	48.269.100	(50.142.400)
2	18	05	2.01	0004	<i>Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>	<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>	<i>Kegiatan Usaha</i>	<i>5</i>	<i>2</i>	<i>Tulungagung</i>	<i>Tulungagung</i>	<i>21.766.500</i>	<i>7.836.500</i>	<i>(13.930.000)</i>
2	18	05	2.01	0005	<i>Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha</i>	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>	<i>Pelaku Usaha</i>	<i>232</i>	<i>120</i>	<i>Tulungagung</i>	<i>Tulungagung</i>	<i>57.375.000</i>	<i>25.769.600</i>	<i>(31.605.400)</i>
2	18	05	2.01	0006	<i>Pengawasan Penanaman Modal</i>	<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i>	<i>Kegiatan Usaha</i>	<i>20</i>	<i>17</i>	<i>Tulungagung</i>	<i>Tulungagung</i>	<i>19.270.000</i>	<i>14.663.000</i>	<i>(4.607.000)</i>
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha yang Terintegrasi	Prosentase	100	100	Tulungagung	Tulungagung	94.384.000	51.020.900	(43.363.100)
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah data perizinan dan non perizinan yang diolah	Dokumen	12	12	Tulungagung	Tulungagung	94.384.000	51.020.900	(43.363.100)
2	18	06	2.01	0002	<i>Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>	<i>Dokumen</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>Tulungagung</i>	<i>Tulungagung</i>	<i>94.384.000</i>	<i>51.020.900</i>	<i>(43.363.100)</i>
					TOTAL							5.843.004.739	5.361.116.439	(481.888.300)

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 dan RKPD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 guna mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan dan diharapkan dapat menjadi panduan dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional sebagai Dinas teknis.

4.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Renja ini dapat dipergunakan sebagai sumber untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Karena itu Perubahan Renja diharapkan dapat diterapkan di Semester II Tahun 2025 dengan konsisten, terbuka, penuh kejujuran dan tanggung jawab sesuai dengan azas-azas kebenaran dan moralitas. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidahkaidah pelaksanaan sebagai berikut:

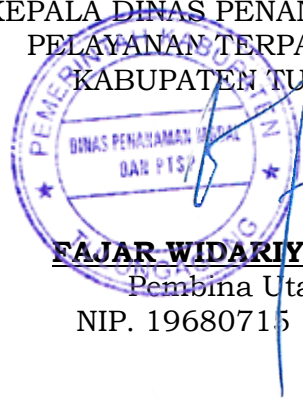
1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025.

4.2.Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Semoga Renja ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tulungagung dan Penyelenggara Pembangunan di Kabupaten Tulungagung.

Tulungagung, 08 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG



FAJAR WIDARIYANTO, SP. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19680715 199803 1 008

MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TULUNGAGUNG
TAHUN 2025

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period e Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumbe r Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							5.603.893.811	5.843.004.739	5.361.116.439							5.749.976.710					
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.603.893.811	5.843.004.739	5.361.116.439							5.749.976.710					
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							5.603.893.811	5.843.004.739	5.361.116.439							5.749.976.710					
1	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata - rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	5.052.648.811	5.452.882.039	5.166.487.139							5.371.355.260					
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Laporan Kinerja	-			14 Dokumen	14 Dokumen	1.664.000	1.664.000	1.664.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengemban gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatk an nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan	Pegawai DPMPTSP		1.555.200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																					
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					8 Dokumen	6 Dokumen	832.000	832.000	624.000	Kab. Tulung agung, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengemban gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatk an nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			655.200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				

	2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	832.000,00	832.000	624.000	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			900.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	-			12 Dokumen	12 Dokumen	3.973.697.211	4.423.310.439	4.423.310.439			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan	Pegawai DPMPPTSP		4.224.223.860	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Org/bln	23 Org/bln	3.949.007.211	4.349.240.439	3.959.096.639	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			4.146.450.360	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Dokumen	1 Dokumen	24.690.000	74.070.000	74.070.000	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			77.773.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	-			30 orang	30 orang	49.330.000	41.488.000	41.488.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengembankan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan	Pegawai DPMPSTP			43.079.400	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	42 Paket	25.000.000	17.158.000	17.158.000	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembankan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan				18.015.900	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	1 Orang	10.330.000	10.330.000	9.870.000	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembankan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan				10.363.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				44 Orang	44 Orang	14.000.000	14.000.000	3.430.000	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembankan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan				14.700.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum yang sesuai SOP	-			80 %	80 %	217.163.500	178.765.500	178.765.500			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan	Pelaku Usaha		196.829.800	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				100 Paket	16 Paket	7.166.000	7.166.000	7.166.000	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			7.525.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Paket	44 Paket	50.000.000	50.000.000	69.672.200	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			73.155.800	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				100 Paket	25 Paket	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			15.750.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	

						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					100 Paket	7 Paket	30.355.800	41.439.300	74.007.000	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			31.875.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	7.512.000	7.512.000	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			7.887.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	99.641.700	57.648.200	52.473.200	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			60.637.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	-				120 unit	120 unit	11.782.500	11.782.500	11.782.500			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan	Pegawai DPMPSTP		12.371.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		

							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					2 Unit	2 Unit	3.120.000	3.120.000	3.120.000	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan				3.276.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	1 Unit	8.662.500	8.662.500	8.662.500	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan				9.095.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen jasa penunjang yang tersedia	-				12 Laporan	12 Laporan	598.401.600	598.401.600	598.401.600			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan	Pegawai DPMPSTP			628.318.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12 Laporan	1.560.000	1.560.000	1.040.000	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan				1.638.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	136.200.000	136.200.000	136.200.000	Kab. Tulung agung, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Dana Alokas i Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengemban gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatk an nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan				143.010.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	230.400.000	230.400.000	228.000.000	Kab. Tulung agung, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Dana Alokas i Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengemban gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatk an nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan				241.920.000,0 0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	230.241.600	230.241.600	230.241.600	Kab. Tulung agung, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Dana Alokas i Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengemban gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatk an nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan				241.750.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	-			100 %	100 %	200.610.000	197.470.000	197.470.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengemban gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatk an nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan	Pegawai DPMPTSP			264.978.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	4 Unit	116.250.000,00	113.110.000,00	139.410.000,00	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan				122.062.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	19 Unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan				10.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	50.000.000	50.000.000	43.000.000	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan				52.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				36 Unit	111 Unit	24.360.000	24.360.000	76.110.000	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan				79.915.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi				850 M	850 M	40.000.000	39.077.500	29.570.500								41.031.300	

	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-			1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	39.077.500	39.077.500			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Pelaku Usaha		41.031.300	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	39.077.500	29.570.500	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			41.031.300	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor				7 %	7 %	10.000.000	46.922.200	13.654.800							49.268.300	
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-			2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	46.922.200	46.922.200			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan	Pelaku Usaha		49.268.300	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	46.922.200	13.654.800	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			49.268.300	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha yang Terverifikasi				92 %	92 %	40.000.000	111.327.500	52.114.000							123.910.500	
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-			600 Pemohon	600 Pemohon	40.000.000	111.327.500	111.327.500			Melanjutkan hilirisasi dan mengemban gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan an nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan	Pelaku Usaha		123.910.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																	
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				50 Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha	20.000.000	83.317.500	30.100.000	Kab. Tulung agung, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Dana Alokas i Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengemban gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan an nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			94.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																	
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				600 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	20.000.000	28.010.000	22.014.000	Semua Kota/ Kab, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Dana Alokas i Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengemban gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan an nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			29.410.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
7	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Laporan Data Investor				50 %	50 %	411.245.000	98.411.500	48.269.100							65.308.150	

	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	411.245.000	98.411.500	98.411.500			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan	Pelaku Usha		65.308.150	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
						Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya					5 Kegiatan Usaha.	2 Kegiatan Usaha.	10.000.000	21.766.500	7.836.500	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			22.854.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko					232 Pelaku Usaha	120 Pelaku Usaha	220.686.000	57.375.000	25.769.600	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			27.058.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha					20 Kegiatan Usaha	17 Kegiatan Usaha	180.559.000	19.270.000	14.663.000	Kab. Tulungagung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			15.396.150	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

8	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha yang Terintegrasi				100 %	100 %	50.000.000	94.384.000	51.020.900							99.103.200	
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Perizinan dan Non Perizinan yang diolah	-			12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000	94.384.000	94.384.000			Melanjutkan hilirisasi dan mengemban gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatk an nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan	Pelaku Usaha		99.103.200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																	
						Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000	94.384.000	51.020.900	Kab. Tulung agung, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Dana Alokas i Umum (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengemban gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatk an nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan sektor unggulan			99.103.200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	J U M L A H											5.603.893.811	5.843.004.739	5.361.116.439						5.749.976.710			